

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PENGELOLA ANGGARAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Suriana, SE, M. Acc

Dosen Fakultas Ekonomi UNIVA MEDAN

NIDN : 0124048305

Email : suriana7771@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelola Anggaran. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Pengolahan data serta analisis statistik mempergunakan program SPSS versi 18.0 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh instrumen penelitian adalah hasil valid dan reliabel. Teknik analisis data digunakan adalah uji koefisien determinasi (R^2) melalui uji regresi linier berganda. Hasil uji statistik dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas mampu mempengaruhi kinerja pengelola anggaran sebesar 8,3% sedangkan sisanya 91,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari tabel *Coefficients*^a diperoleh persamaan regresi linier berganda $Y = 32,696 + 0,069 + 0,200$. Konstanta (a) = 32,696 bertanda positif transparansi dan akuntabilitas 0,069 dan 0,200 bertanda positif, artinya adalah transparansi dan akuntabilitas secara parsial mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja pengelola anggaran. Sedangkan secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran.

Keywords: *Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja Pengelola Anggaran*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-

pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintahan serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintahan diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Disamping itu, kedudukan dinas kehutanan sebagai wakil gubernur urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang diamanatkan pp nomor 19 tahun 2010 pasal 3 huruf d.

Pengelolaan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Laporan Keuangan. Sebuah prestasi yang membanggakan namun bukan berarti pengelolaan dilakukan sudah sempurna karna masih ada yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Beberapa yang masih perlu dibenahi, antara lain: proses penyerahan Barang Milik Negara kepada masyarakat atau pemerintah daerah yang masih berlarut-larut dengan nilai yang cukup besar, serta proses penyelesaian revaluasi asset yang belum tuntas. Kurangnya kompetensi dalam mengelola Barang Milik Negara, kurangnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

terhadap pengelola anggaran juga menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan muncul banyaknya persoalan lain, inilah yang menjadi alasan masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Imam S. Tunggal dan W Tunggal (2002: 7) transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses).

Transparansi menurut Agoes dan Ardana (2009: 104) adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Kriteria Transparansi

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria menurut Mardiasmo (2003) sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2009: 20) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Hamid (2007: 136) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan (Akdon, 2009: 208).

Kinerja Pengelola Anggaran

Indra Bastian (2010: 274), menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi.

Anggaran menurut Mardiasmo (2009: 67) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran adalah alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan.

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan rumusan masalah yang ada telah dikemukakan diawal, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Di duga terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
2. Di duga terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
3. Di duga terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamt di Jalan Sisingamangaraja Medan.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang atau pegawai maupun pimpinan bagian keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah variabel yang akan diteliti yaitu Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan Kinerja pengelola anggaran (Y).

3.3 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan pimpinan bagian keuangan, sub bagian tata usaha, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 30 orang. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Ulber Silalahi, 2009:254). Dengan demikian maka peneliti menggunakan *purposive sampling* yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dipilih. Dengan demikian maka peneliti menetapkan sampel jenuh, karena jumlah populasi sama dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 30 orang.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif statistic*. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian, maka model tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik.

3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih variabel independen. Dalam model ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

3.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti, sehingga akan menjawab rumusan masalah.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah pimpinan pegawai yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 30 orang. Profil responden yang ditanyakan pada kuesioner adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa kerja dan golongan dari masing-masing responden.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dipersyaratkan untuk model regresi dilakukan dan diperoleh kesimpulan bahwa semua asumsi dalam penelitian ini telah terpenuhi.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32.696	5.245		6.233	.000
Transparansi	.344	.238	.265	1.445	.344
Akuntabilitas	.200	.195	.236	1.022	.316

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel 4.12 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = 32,696 + 0,069 X_1 + 0,200 X_2 + e$$

4.4 Uji koefisien determinasi (R^2)

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.289 ^a	.083	.016	3.51597

- a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi
- b. Dependent Variable: Kinerja

Dari hasil pengolahan data diperoleh Adjusted (R^2) sebesar 0,016%, Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 1,6 %. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (Akuntabilitas, Transparansi) hanya mampu menjelaskan sebesar 1,6% variasi variabel dependen (Kinerja) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sisanya 98,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.5 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.12, jika nilai *probability* $t < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability* $t > 0,05$ maka H_a ditolak.

Tabel pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$, dengan derajat kebebasan $df = n-2$ atau $30 - 2 = 28$, yaitu 2,048. Dari hasil output pada uji t tes berdasarkan nilai t hitung pada tabel 4.12 di atas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari kedua variabel bebas tersebut, variabel bebas transparansi diperoleh t hitung sebesar $t = 0,329$ yakni lebih kecil dari t tabel = 2,048. Dengan demikian berarti bahwa secara individual transparansi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja pengelola anggaran. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,744 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_a ditolak. Untuk variabel bebas kedua yaitu Akuntabilitas diperoleh nilai t hitung = $1,022 < t$ tabel. Hal ini berarti bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pengelola anggaran.

Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,316 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.6 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.14

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	30.391	2	15.196	1.229	.308 ^b
Residual	333.776	27	12.362		
Total	364.167	29			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.308 atau lebih besar dari nilai probabilitas (p-value) 0.05 ($0.308 > 0.05$), ini berarti bahwa variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas, secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tabel *Coefficients^a* persamaan regresi $Y = 32,696 + 0,069X_1 + 0,200X_2$. Konstanta (a) = 32,696 bertanda positif dan transparansi 0,069 bertanda positif serta akuntabilitas 0,200 juga bertanda positif, artinya adalah

transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja pengelola anggaran.

2. Secara parsial variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
3. Dari tabel *Model Summar^{ya}*, angka R sebesar 0,289 menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau hubungan antara variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah hubungan yang kurang atau lemah.
4. Nilai koefisien determinasi (R^2) hasil regresi sebesar 0,83 artinya bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar 24,8% terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
5. Secara simultan variabel transparansi dan akuntabilitas, secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Dari penelitian yang telah dilakukan transparansi dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan dan secara simultan tidak berpengaruh, maka dari itu penulis menyarankan kepada pimpinan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar dapat mensinergikan keduanya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
2. Dalam mengevaluasi anggaran harus dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi atau yang sesungguhnya terjadi dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk pimpinan agar meningkatkan pemahaman pegawainya berkenaan dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Natasijanu Erhan 2019. Skripsi, *pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap kinerja guru di SMP Negeri I Tanjungbalai*
- Didjaja, Mustofa.2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra, alimuddin Saragih 2007, Skripsi. *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan ekonomi desa.*
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Ilyas Abdullah 2020. Skripsi. *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah serta dampak terhadap kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah Muqimatus Sunnah Palembang.*